

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
(LKPP)**

**Nota Dinas**

Nomor : 8315/Ses.1/03/2024

Yth. : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Februari Tahun 2024  
Tanggal : 22 Maret 2024

Sehubungan dengan tahun anggaran 2024 dan telah berakhirnya periode bulan Februari 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 244.786.416.000 dan sampai dengan bulan Februari 2024 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp 15.932.975.679 (6,51%)
2. Dari pagu anggaran tersebut, pagu pengadaan LKPP sebesar Rp 190.987.837.000 (78,02%). Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 13 Maret 2024, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp 196.613.760.000 atau sebesar 102,95%. Terdapat Selisih pagu pengadaan dengan penayangan pada aplikasi SiRUP adalah sebesar -Rp 5.625.923.000.
3. Pada capaian kinerja fisik, LKPP memiliki 4 Indikator Sasaran Strategis (rata-rata progres 3,75%), 14 Indikator Sasaran Program (rata-rata progres 18,6%), 61 Indikator Sasaran Kegiatan (rata-rata progres 16,02%), 70 Rincian Output (rata-rata progres 14,89%), dan 187 Komponen (rata-rata progres 16,29%).
4. Terdapat indikator yang realisasinya telah melebihi target, yaitu:
  - a. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik
  - b. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-purchasing dengan sistem lainnya
  - c. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing
  - d. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda
  - e. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK
  - f. Indikator Rincian Output - SDM JF PPBJ
5. Berkaitan dengan hal-hal diatas, untuk meningkatkan kinerja dan anggaran LKPP diharapkan setiap Unit Organisasi agar:
  - a. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan memperhatikan target penyerapan triwulanan sesuai dengan Nota Dinas Plt. Sekretaris Utama Nomor 2723/SES/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan menyampaikan RPD tersebut kepada Biro Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
  - c. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$ ;
  - d. Mencermati dan segera meng-update pengumuman RUP di SiRUP bagi unit organisasi yang penayangan RUP pada aplikasi SiRUP belum sesuai dengan anggaran belanja pengadaannya;
  - e. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan paket pengadaan barang/jasa yang sudah diumumkan dapat segera diproses dalam triwulan I;
  - f. Memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing (Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Rincian Output dan komponen);
  - g. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring dan



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing;

- h. Menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Februari 2024 dan melaporkan progres tindaklanjut melalui Aplikasi SiREMON.
6. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 dari Kementerian PAN-RB, setiap unit organisasi agar mengoptimalkan fitur pada aplikasi SiREMON dalam pemberian *feedback* atas rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dalam hal membutuhkan penjelasan dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Sdri. Resa Anggriani (0819-3209-6526). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

Iwan Herniwan

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3. Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

# LAPORAN

## Monitoring & Evaluasi Kinerja Unit Organisasi

Periode Bulan Februari

TAHUN  
**20**  
**24**

Biro Perencanaan dan Keuangan

Gedung LKPP Lt.9

Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, RT.2/RW.5, Karet  
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta



[www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id)



lkpp\_ri



Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah



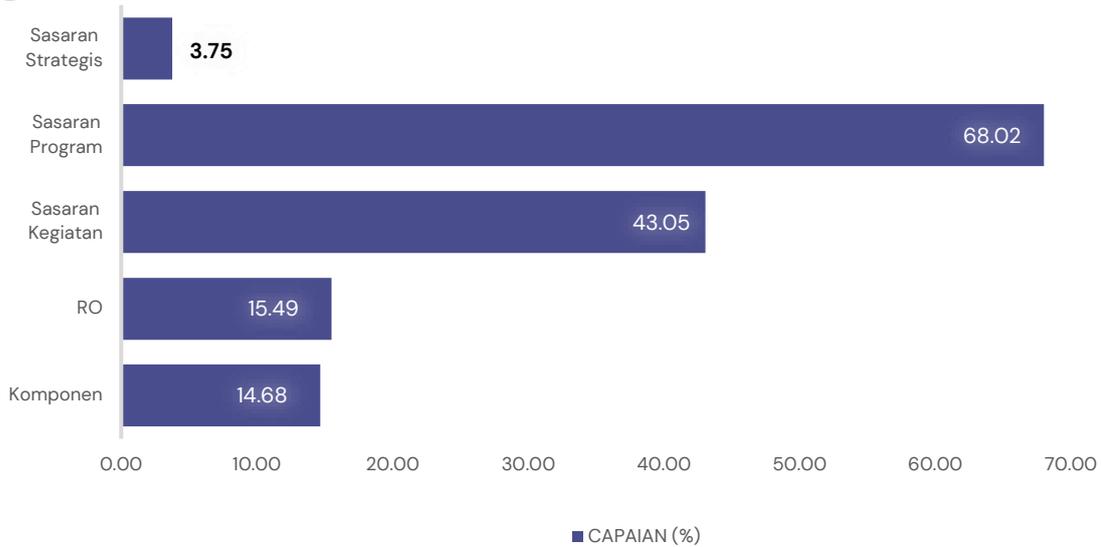
021-29935577  
144

# SUMMARY

## Capaian Fisik Lembaga



### Capaian Fisik



### Sasaran Strategis



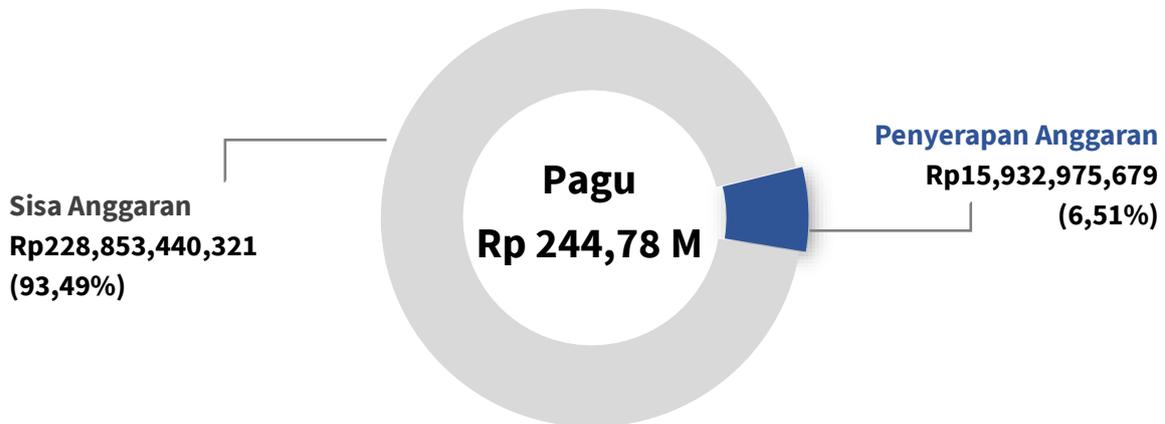
# SUMMARY

## Penyerapan Anggaran

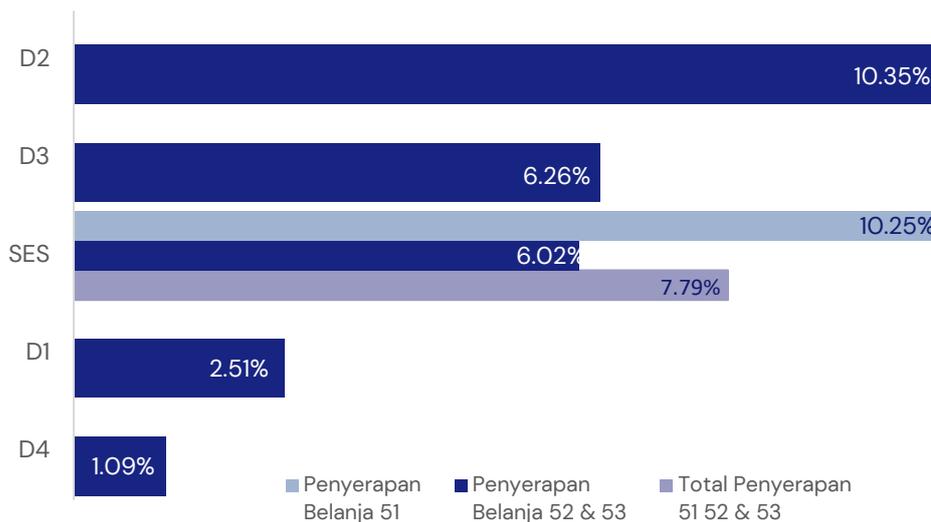


Realisasi Penyerapan Anggaran LKPP TA 2024 berdasarkan aplikasi MonSAKTI

Per tanggal 29 Februari 2024



Realisasi Penyerapan Anggaran Unit Organisasi Eselon I TA 2024 berdasarkan aplikasi MonSAKTI

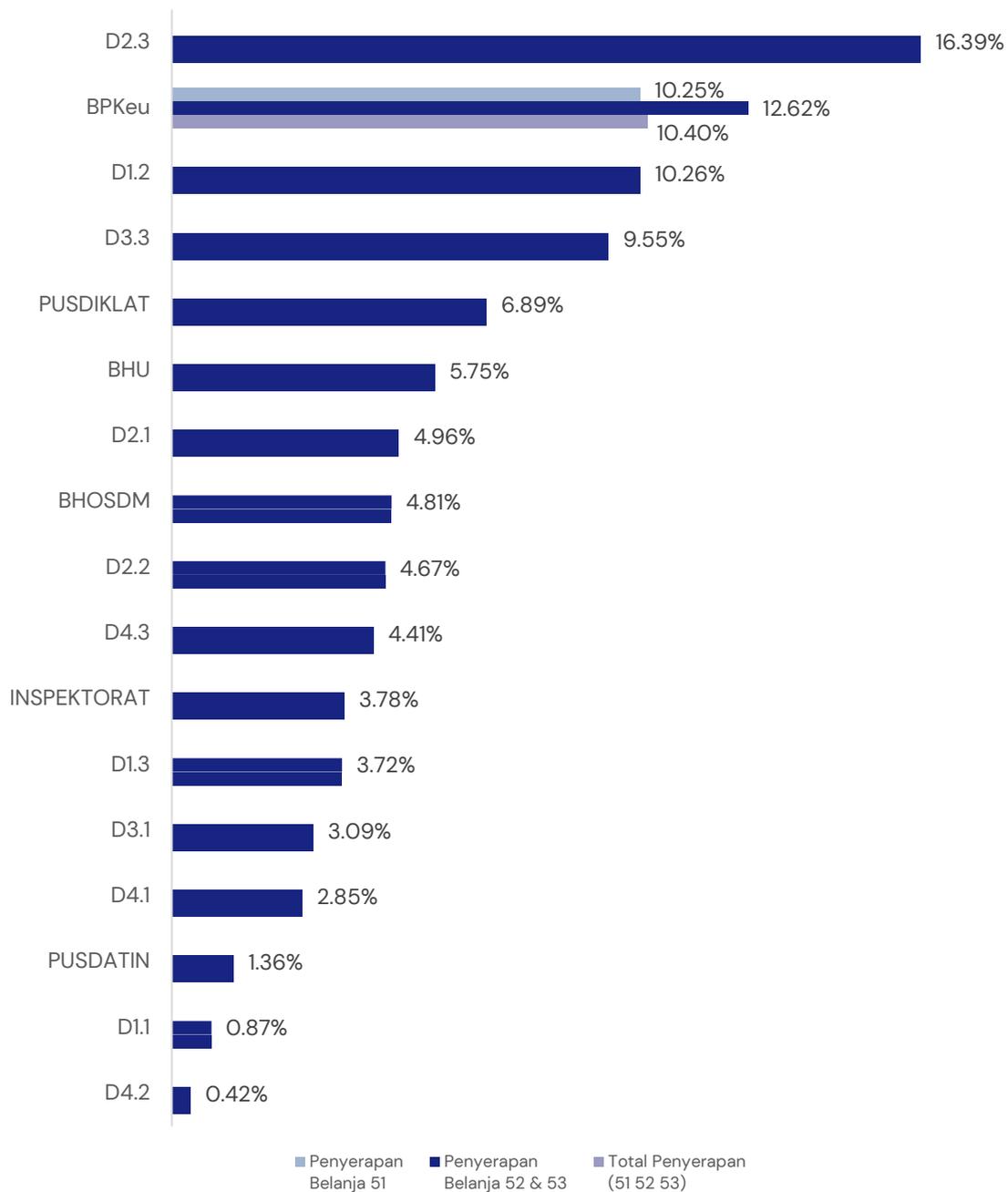


\*Sumber: Aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan RI tanggal 29 Februari 2024

Sampai dengan 29 Februari 2024, berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 terbesar terdapat pada Kedepuitan Bidang Transformasi Pengadaan Digital (10,35% - Rp3.925.937.494) dan terkecil terdapat pada Kedepuitan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah (1,09% - Rp262.719.359).



## Realisasi Penyerapan Anggaran Per Unor Es. II



Sampai dengan 29 Februari 2024, berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon II, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 terbesar terdapat pada Direktorat Pasar Digital Pengadaan (16,39% - Rp2.993.700.431) dan terkecil terdapat pada Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (0,42% - Rp77.841.875).

# Perbandingan Rencana Penarikan Dana (RPD) Dengan Realisasi Anggaran

No.	Unit Organisasi	RPD Februari (Rp)	Realisasi Anggaran Februari (Rp)	Deviasi (Rp)	% Deviasi*
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6 = (5 / 3)
1	BHOSDM	300.442.235	286.248.822	-14.193.413	-4,72%
2	BHU	2.223.160.237	3.297.911.998	1.074.751.761	48,34%
3	BPKEU	251.814.833	215.021.358	-36.793.475	-14,61%
4	BPKEU (Belanja Pegawai)	3.995.530.536	4.003.323.107	7.792.571	0,20%
5	D1.1	215.932.006	162.327.333	-53.604.673	-24,82%
6	D1.2	114.668.744	218.989.560	104.320.816	90,98%
7	D1.3	540.144.121	392.764.402	-147.379.719	-27,29%
8	D2.1	166.732.246	194.533.669	27.801.423	16,67%
9	D2.2	2.438.703.279	692.383.394	-1.746.319.885	-71,61%
10	D2.3	644.527.338	2.255.407.431	1.610.880.093	249,93%
11	D3.1	17.319.446	82.085.996	64.766.550	373,95%
12	D3.3	257.316.997	260.537.156	3.220.159	1,25%
13	D4.1	38.691.869	79.895.666	41.203.797	106,49%
14	D4.2	175.904.859	71.819.875	-104.084.984	-59,17%
15	D4.3	96.955.355	72.345.818	-24.609.537	-25,38%
16	Inspektorat	172.412.496	16.461.046	-155.951.450	-90,45%
17	PUSDATIN	142.281.227	115.643.150	-26.638.077	-18,72%
18	PPSDM PBJ	221.552.766	176.670.000	-44.882.766	-20,26%
<b>TOTAL LKPP</b>		<b>12.014.090.590</b>	<b>12.594.369.781</b>	<b>580.279.191</b>	<b>4,83%</b>

## Catatan:

- \* 1. Ambang batas deviasi antara RPD dengan realisasi adalah sebesar  $\pm 5\%$  untuk nilai maksimum IKPA LKPP;  
 2. Kinerja Unit Organisasi semakin baik bila Persentase Deviasi antara RPD dengan Realisasi Anggaran mendekati 0%.  
 3. Persentase Deviasi bernilai positif (+) jika Realisasi Anggaran lebih besar dari RPD  
 4. Persentase Deviasi bernilai negatif (-) jika Realisasi Anggaran lebih kecil dari RPD  
 5. Realisasi Anggaran (4) yang ditampilkan merupakan penyerapan anggaran parsial bulan Februari tahun 2024

Realisasi anggaran diluar ambang batas toleransi deviasi sebesar  $\pm 5\%$

Realisasi anggaran masih dalam ambang batas toleransi deviasi sebesar  $\pm 5\%$

## DAFTAR ISI

<b>SUMMARY</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>9</b>
<b>MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA</b> .....	<b>9</b>
<b>1.1 ANGGARAN</b> .....	<b>9</b>
1.1.1    Pagu Anggaran .....	9
1.1.2    Penyerapan Anggaran.....	10
<b>1.2 PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA</b> .....	<b>11</b>
<b>1.3 PELAPORAN EKSTERNAL</b> .....	<b>12</b>
1.3.1    Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan .....	12
1.3.2    Pelaporan Kinerja pada E-Monev Bappenas.....	13
<b>BAB II MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI</b> .....	<b>14</b>
<b>2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)</b> .....	<b>14</b>
A.    Capaian Kinerja Fisik.....	14
B.    Capaian Kinerja Anggaran .....	15
C.    Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	15
D.    Rekomendasi.....	15
<b>2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)</b> .....	<b>16</b>
A.    Capaian Kinerja Fisik.....	16
B.    Capaian Kinerja Anggaran .....	17
C.    Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	17
D.    Rekomendasi.....	18
<b>2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)</b> .....	<b>18</b>
A.    Capaian Kinerja Fisik.....	18
B.    Capaian Kinerja Anggaran .....	19
C.    Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	19
D.    Rekomendasi.....	20
<b>2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)</b> .....	<b>20</b>
A.    Capaian Kinerja Fisik.....	20
B.    Capaian Kinerja Anggaran .....	21
C.    Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	21
D.    Rekomendasi.....	22
<b>2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)</b> .....	<b>23</b>
A.    Capaian Kinerja Fisik.....	23
B.    Capaian Kinerja Anggaran .....	23
C.    Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	24
D.    Rekomendasi.....	24
<b>2.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)</b> .....	<b>25</b>
A.    Capaian Kinerja Fisik.....	25
B.    Capaian Kinerja Anggaran .....	25

C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	26
D.	Rekomendasi.....	26
<b>2.7</b>	<b>DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1) .....</b>	<b>27</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	27
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	28
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	28
D.	Rekomendasi.....	28
<b>2.8</b>	<b>DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2).....</b>	<b>29</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	29
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	30
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	30
D.	Rekomendasi.....	31
<b>2.9</b>	<b>DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3) .....</b>	<b>32</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	32
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	33
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	33
D.	Rekomendasi.....	34
<b>2.10</b>	<b>DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1) .....</b>	<b>35</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	35
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	36
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	36
D.	Rekomendasi.....	37
<b>2.11</b>	<b>DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3) .....</b>	<b>38</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	38
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	38
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D.	Rekomendasi.....	39
<b>2.12</b>	<b>DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1) .....</b>	<b>40</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	40
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	41
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	41
D.	Rekomendasi.....	41
<b>2.13</b>	<b>DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2) .....</b>	<b>42</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	42
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	43
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	43
D.	Rekomendasi.....	44
<b>2.14</b>	<b>DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3).....</b>	<b>45</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	45
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	46
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	46
D.	Rekomendasi.....	47
<b>2.15</b>	<b>INSPEKTORAT .....</b>	<b>47</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	47
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	48

C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	48
D.	Rekomendasi.....	48
<b>2.16</b>	<b>PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA .....</b>	<b>49</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	49
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	50
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	50
D.	Rekomendasi.....	51
<b>2.17</b>	<b>PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN) .....</b>	<b>51</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik.....	51
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	52
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	52
D.	Rekomendasi.....	52
<b>BAB III</b>	.....	<b>54</b>
<b>KESIMPULAN</b>	.....	<b>54</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>54</b>

## BAB I MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA

### 1.1 ANGGARAN

#### 1.1.1 Pagu Anggaran

Berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor: SP DIPA- DIPA-106.01-0/2024 tanggal 24 Februari 2024, pagu anggaran LKPP Tahun 2024 sebesar Rp244.786.416.000. Adapun komposisi anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
<b>51 Belanja Pegawai</b>	53.798.579.000	21,98%
<b>52 Belanja Barang</b>	169.724.173.000	69,34%
<b>53 Belanja Modal</b>	21.263.664.000	8,687%
<b>TOTAL</b>	<b>244.786.416.000</b>	<b>100%</b>

Adapun pembagian pagu anggaran tersebut ke Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
<b>SETTAMA</b>	<b>53.798.579.000</b>	<b>55.515.411.000</b>	<b>19.411.512.000</b>	<b>74.926.923.000</b>
BHOSDM	-	5.956.861.000	-	5.956.861.000
BPKeu	-	3.683.337.000	-	3.683.337.000
BHU	-	45.875.213.000	19.411.512.000	65.286.725.000
BPKeu (Belanja Pegawai)	53.798.579.000	-	-	53.798.579.000
<b>Kedeputian 1 (D1)</b>	-	<b>31.625.133.000</b>	-	<b>31.625.133.000</b>
D1.1	-	18.754.375.000	-	18.754.375.000
D1.2	-	2.318.730.000	-	2.318.730.000
D1.3	-	10.552.028.000	-	10.552.028.000
<b>Kedeputian 2 (D2)</b>	-	<b>37.933.299.000</b>	-	<b>37.933.299.000</b>
D2.1	-	4.831.489.000	-	4.831.489.000
D2.2	-	14.831.835.000	-	14.831.835.000
D2.3	-	18.269.975.000	-	18.269.975.000
<b>Kedeputian 3 (D3)</b>	-	<b>7.789.260.000</b>	-	<b>7.789.260.000</b>
D3.1	-	3.969.791.000	-	3.969.791.000
D3.3	-	3.819.469.000	-	3.819.469.000
<b>Kedeputian 4 (D4)</b>	-	<b>23.994.341.000</b>	-	<b>23.994.341.000</b>
D4.1	-	3.229.245.000	-	3.229.245.000
D4.2	-	18.663.984.000	-	18.663.984.000
D4.3	-	2.101.112.000	-	2.101.112.000
INSPEKTORAT	-	<b>1.000.000.000</b>	-	<b>1.000.000.000</b>
PUSLAT	-	<b>3.444.686.000</b>	<b>467.208.000</b>	<b>3.911.894.000</b>
PUSDATIN	-	<b>8.422.043.000</b>	<b>1.384.944.000</b>	<b>9.806.987.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.798.579.000</b>	<b>169.724.173.000</b>	<b>21.263.664.000</b>	<b>244.786.416.000</b>

### 1.1.2 Penyerapan Anggaran

Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan 29 Februari 2024 penyerapan anggaran LKPP adalah sebesar Rp15.932.975.679 atau sebesar 6,51%. Adapun rincian penyerapan anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Penyerapan per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	5.516.018.693	10,25%	48.282.560.307
52 Belanja Barang	169.724.173.000	10.053.844.486	5,92%	159.670.328.514
53 Belanja Modal	21.263.664.000	363.112.500	1,71%	20.900.551.500
<b>Total</b>	<b>244.786.416.000</b>	<b>15.932.975.679</b>	<b>6,51%</b>	<b>228.853.440.321</b>

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
<b>D1</b>	31.625.133.000	792.881.295	2,51%	30.832.251.705
<b>D2</b>	37.933.299.000	3.925.937.494	10,35%	34.007.361.506
<b>D3</b>	7.789.260.000	487.531.604	6,26%	7.301.728.396
<b>D4</b>	23.994.341.000	262.719.359	1,09%	23.731.621.641
<b>INSPEKTORAT</b>	1.000.000.000	37.801.046	3,78%	962.198.954
<b>PUSDATIN</b>	9.806.987.000	133.211.150	1,36%	9.673.775.850
<b>PUSLAT</b>	3.911.894.000	269.450.000	6,89%	3.642.444.000
<b>SES</b>	74.926.923.000	4.507.425.038	6,02%	70.419.497.962
<b>SES (Gaji)</b>	53.798.579.000	5.516.018.693	10,25%	48.282.560.307
<b>TOTAL</b>	<b>244.786.416.000</b>	<b>15.932.975.679</b>	<b>6,51%</b>	<b>228.853.440.321</b>

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
<b>BHOSDM</b>	5.956.861.000	286.248.822	4,81%	5.670.612.178
<b>BHU</b>	65.286.725.000	3.756.484.358	5,75%	61.530.240.642
<b>BPKeu</b>	3.683.337.000	464.691.858	12,62%	3.218.645.142
<b>BPKeu (Gaji)</b>	53.798.579.000	5.516.018.693	10,25%	48.282.560.307
<b>D1.1</b>	18.754.375.000	162.327.333	0,87%	18.592.047.667
<b>D1.2</b>	2.318.730.000	237.789.560	10,26%	2.080.940.440
<b>D1.3</b>	10.552.028.000	392.764.402	3,72%	10.159.263.598

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
D2.1	4.831.489.000	239.853.669	4,96%	4.591.635.331
D2.2	14.831.835.000	692.383.394	4,67%	14.139.451.606
D2.3	18.269.975.000	2.993.700.431	16,39%	15.276.274.569
D3.1	3.969.791.000	122.744.448	3,09%	3.847.046.552
D3.3	3.819.469.000	364.787.156	9,55%	3.454.681.844
D4.1	3.229.245.000	92.128.666	2,85%	3.137.116.334
D4.2	18.663.984.000	77.841.875	0,42%	18.586.142.125
D4.3	2.101.112.000	92.748.818	4,41%	2.008.363.182
INSPEKTORAT	1.000.000.000	37.801.046	3,78%	962.198.954
PUSDATIN	9.806.987.000	133.211.150	1,36%	9.673.775.850
PUSLAT	3.911.894.000	269.450.000	6,89%	3.642.444.000
<b>TOTAL</b>	<b>244.786.416.000</b>	<b>15.932.975.679</b>	<b>6,51%</b>	<b>228.853.440.321</b>

## 1.2 PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu pengadaan LKPP adalah sebesar Rp190.987.837.000 (78,02%) dari pagu total LKPP. Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 13 Maret 2024, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar **Rp196.613.760.000** atau sebesar **102,95%** yang terdiri dari:

Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Total Pagu Paket (Rp)	%
Jasa Lainnya	576	85.146.810.000	44,58%
Barang	364	43.241.377.000	22,64%
Jasa Konsultansi	25	6.120.436.000	3,20%
Pekerjaan Konstruksi	2	550.000.000	0,29%
Swakelola	437	61.555.137.000	32,23%
<b>TOTAL</b>	<b>1404</b>	<b>196.613.760.000</b>	<b>102,95%</b>

Metode Pemilihan	Jumlah Paket	Total Pagu Paket (Rp)	%
Pengadaan Langsung	516	34.592.140.000	18,11%
e-Purchasing	269	39.545.805.000	20,71%
Tender	8	37.219.944.000	19,49%
Penunjukan Langsung	4	4.723.630.000	2,47%
Dikecualikan	163	14.762.464.000	7,73%
Seleksi	7	4.214.640.000	2,21%
Swakelola	437	61.555.137.000	32,23%

Metode Pemilihan	Jumlah Paket	Total Pagu Paket (Rp)	%
<b>TOTAL</b>	<b>1404</b>	<b>196.613.760.000</b>	<b>102,95%</b>

Adapun progres penayangan paket pengadaan barang/jasa per Unit Organisasi Eselon II adalah sebagai berikut (dalam juta rupiah):

Unit Organisasi Eselon II	Pagu Pengadaan	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total Paket		Persentase Penayangan
		Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	
BHOSDM	5.956,86	77	4.922,88	30	1.033,98	0	0,00	107	5.956,86	100,00%
BHU	65.286,73	154	59.161,21	137	5.936,58	6	144,54	297	65.242,33	99,93%
BPKeu	3.683,34	71	3.603,28	65	424,10	0	0,00	136	4.027,37	109,34%
D1.1	18.754,38	2	5.281,85	26	18.183,58	7	570,80	35	24.036,22	128,16%
D1.2	2.318,73	0	0,00	9	174,67	41	2.144,06	50	2.318,73	100,00%
D1.3	10.552,03	0	0,00	11	8.940,08	7	1.611,95	18	10.552,03	100,00%
D2.1	4.831,49	63	4.269,71	1	400,00	0	0,00	64	4.669,71	96,65%
D2.2	14.831,84	54	12.134,18	20	2.697,66	0	0,00	74	14.831,84	100,00%
D2.3	18.269,98	34	3.979,09	31	14.290,89	1	2.451,02	66	20.721,00	113,42%
D3.1	3.969,79	0	0,00	9	1.633,62	37	2.336,17	46	3.969,79	100,00%
D3.3	3.819,47	106	2.584,42	36	1.235,05	0	0,00	142	3.819,47	100,00%
D4.1	3.229,25	18	1.350,22	16	543,78	5	215,21	39	2.109,21	65,32%
D4.2	18.663,98	13	685,40	9	3.424,75	121	14.552,95	143	18.663,09	100,00%
D4.3	2.101,11	35	1.382,31	9	718,81	0	0,00	44	2.101,11	100,00%
INSPEKTORAT	1.000,00	16	570,18	7	330,68	1	99,14	24	1.000,00	100,00%
PPSDM PBJ	9.806,99	0	0,00	18	1.457,24	46	2.454,65	64	3.911,89	100,00%
PUSDATIN	3.911,89	52	8.553,41	3	129,70	0	0,00	55	8.683,11	88,54%
<b>TOTAL</b>	<b>190.987,84</b>	<b>695</b>	<b>108.478,14</b>	<b>437</b>	<b>61.555,14</b>	<b>272</b>	<b>26.580,49</b>	<b>1404</b>	<b>196.613,76</b>	<b>102,95%</b>

Persentase Penayangan Tidak 100%

Rata-rata persentase penayangan sebesar 102,95% dikarenakan masih terdapat unit organisasi yang melakukan proses revisi menayangkan paket pengadaan. Selisih pagu pengadaan dengan penayangan pada aplikasi SiRUP adalah sebesar -Rp5.625.923.000.

### 1.3 PELAPORAN EKSTERNAL

#### 1.3.1 Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan

Aplikasi SMART DJA merupakan sebuah aplikasi milik Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L. Aplikasi ini menampilkan hasil nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Kementerian/Lembaga dari level Satker, Unit Eselon I hingga level Kementerian/Lembaga. Nilai EKA ini akan digunakan sebagai salah satu indikator pemberian penghargaan dan/atau sanksi atas kinerja anggaran Kementerian/Lembaga.

Pada bulan Februari 2024 telah dilakukan pengisian dan assesment Rincian Output (RO) pada aplikasi SMART DJA dimana saat ini 70 RO telah dikonfirmasi oleh DJA sebagaimana terdapat pada tampilan berikut:

No.	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Jenis RO	Cara Pelaporan	Pelarasi Capaian	Pelarasi Waktu	Status Kefimfasi		Aksi	Tanggal Update	Histori
							KL	DJA			
1	CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 0219 Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa AAC Peraturan Pemerintah 111 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1,0000 (RPP)	Statis	Otomatis	Maximize	Stabilized	✓	✓	-	2024-01-30 14:15:29	
2	CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 0219 Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa AAD Peraturan Presiden 111 Rancangan Peraturan Presiden tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1,0000 (R.Perpres)	Statis	Otomatis	Maximize	Stabilized	✓	✓	-	2024-01-30 14:15:31	
3	CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 0319 Penyelenggaraan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	2,0000 (Rancangan)	Statis	Tahapan	Maximize	Stabilized	✓	✓	-	2024-01-30 14:15:31	

Gambar 3. 1 Tampilan Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan pada Menu Assessment RO

Sampai dengan saat ini NKA LKPP per Februari 2024 belum dapat diinformasikan dikarenakan aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2024.

### 1.3.2 Pelaporan Kinerja pada E-Monev Bappenas

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga perlu melaksanakan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev Bappenas.

Pengumpulan data pada aplikasi ini adalah rutin setiap bulannya. Setiap K/L/PD diharapkan dapat melaporkan kinerjanya melalui e-monev bappenas setiap bulan. Sampai dengan Februari 2024 LKPP belum dapat melaporkan capaian kinerja dikarenakan aplikasi e-monev BAPPENAS masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2024.



Gambar 3. 2 Tampilan Aplikasi E-Monev Bappenas

## BAB II

### MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI

#### 2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)

##### A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKeu) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 4 Rincian Output, dan 9 Komponen dengan rincian sebagai berikut:

##### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi /Progres
1	8.4 - Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran	Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Predikat: Sangat Baik	Progres: 17%
		Indeks maturitas SPIP	Predikat: Terdefinisi	Progres: 12%
		Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Predikat: Baik	Progres: 16,66%

##### 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 16,66%
2.	955-Layanan Manajemen Keuangan	17 Dokumen	Progres: 16,66%
3.	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7 Dokumen	Progres: 10%
4.	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	Progres: 13%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan Februari 2024 adalah 14,08%.

##### 3. Komponen

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki 9 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Februari 2024 adalah 14,74%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar Rp57.481.916.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024, penyerapan per jenis belanja pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	5.516.018.693	10.25%	48.282.560.307
52 Belanja Barang	3.683.337.000	464.691.858	12.62%	3.218.645.142
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>57.481.916.000</b>	<b>5.980.710.551</b>	<b>10.4%</b>	<b>51.501.205.449</b>

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BPKeu di bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Nilai IKPA pada bulan Februari yaitu sebesar 64,43 yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan Januari yaitu sebesar 57,53.
2. Pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran BPKeu (parsial) sebesar 215.021.358. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar 251.814.833 sehingga memiliki deviasi sebesar -36.793.475 atau -14,61%.
3. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) BPKeu adalah 109,34%. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.
4. Pada indikator Penyusunan Rencana RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Belum adanya perhitungan dan metadata yang jelas terkait indikator yang diusulkan menjadi prioritas.

## D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKeu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:

- a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
  5. Melakukan monitoring pelaporan serta dokumen pendukung yang telah diserahkan kepada Kementerian PANRB sebagai syarat evaluasi penilaian SAKIP, serta secara simultan menyiapkan untuk dimasukkan ke dalam dashboard SAKIP yang telah di kembangkan.
  6. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
  7. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
  8. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

## 2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM) memiliki 6 indikator sasaran kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	8.1-Meningkatnya kualitas deregulasi kebijakan	Indeks kualitas kebijakan	Predikat: Baik	Progres: 10%
		Indeks reformasi hukum	Predikat: Istimewa	Progres: 10%
2.	8.2-Terwujudnya penguatan organisasi, tata laksana, dan koordinasi penerapan reformasi birokrasi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	100 Persen	Progres: 15%
		Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	Skor: 75	Progres: 21%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
3.	8.3-Meningkatnya profesionalitas SDM	Indeks profesionalitas ASN	Predikat: Sangat Tinggi	Progres: 38%
		LKPP		
		Indeks sistem merit	Predikat: Sangat Baik	Progres: 38%

## 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	957-Layanan Hukum	1 Layanan	Progres: 14,55%
2.	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2 Layanan	Progres: 21%
3.	961-Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	Progres: 15%
4.	969-Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	Progres: 10,81%
5.	954-Layanan Manajemen SDM	510 Orang	Progres: 15%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada bulan Februari 2024 adalah 15,27%.

## 3. Komponen

Tahun 2024, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Februari 2024 adalah 14,71%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran BHOSDM TA 2024 adalah sebesar Rp 5.956.861.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHOSDM sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	5.956.861.000	286.248.822	4.81%	5.670.612.178
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5.956.861.000</b>	<b>286.248.822</b>	<b>4.81%</b>	<b>5.670.612.178</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHOSDM di bulan Februari 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran BHOSDM (parsial) sebesar Rp286.248.822. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp300.442.235 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp14.193.413 atau -4,72%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) BHOSDM telah 100% ditayangkan.

## D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
5. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

## 2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU) memiliki 7 indikator sasaran kegiatan, 8 indikator Rincian Output, dan 18 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	8.5-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Nilai: B	Progres: 0%
		Indeks pelayanan publik	Predikat: Sangat Baik	Progres: 0%
		Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks: Informatif	Progres: 16,93%
2.		Hasil pengawasan kearsipan	Predikat: Memuaskan	Progres: 20%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
	8.6-Meningkatnya kualitas pelayanan umum internal	Indeks tata kelola pengadaan	Predikat: Istimewa	Progres: 26%
		Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan kegiatan pimpinan eselon I	Predikat: Sangat Baik	Progres: 10%
		Indeks kualitas pengelolaan aset	Nilai: 3,05	Progres: 32%

## 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	5 Layanan	Progres: 14,85%
2.	956-Layanan BMN	1 Layanan	Progres: 30%
3.	959-Layanan Protokoler	1 Layanan	Progres: 32,14%
4.	962-Layanan Umum	1 Layanan	Progres: 26%
5.	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 51,10%
6.	951-Layanan Sarana Internal	83 Unit	Progres: 10%
7.	971-Layanan Prasarana Internal	1 Unit	Progres: 0%
8.	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	Progres: 10%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada bulan Februari 2024 adalah 21,76%.

## 3. Komponen

Tahun 2024 Biro Hubungan Masyarakat dan Umum memiliki 18 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Februari 2024 adalah 21,96%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran BHU TA 2024 adalah sebesar Rp 65.286.725.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHU sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	45.875.213.000	3.393.371.858	7.4%	42.481.841.142
53 Belanja Modal	19.411.512.000	363.112.500	1.87%	19.048.399.500
<b>Total</b>	<b>65.286.725.000</b>	<b>3.756.484.358</b>	<b>5.75%</b>	<b>61.530.240.642</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHU di bulan Februari 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran BHU (parsial) sebesar Rp3.297.911.998. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp2.223.160.237 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp1.074.751.761 atau 48,34%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) BHU adalah 99,93% yang ditayangkan, hal ini karena rencana pengadaan belum seluruhnya di input pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.

---

#### **D. Rekomendasi**

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
5. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
6. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

## **2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)**

---

### **A. Capaian Kinerja Fisik**

---

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) memiliki 1 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	4 Rancangan Peraturan	Progres: 5,44%

## 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	111-Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 RPP	Progres: 6,00%
2.	111-Rancangan Peraturan Presiden tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 R.Perpres	Progres: 12,50%
3.	111-Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Rancangan Peraturan	Progres: 1,43%
4.	111-Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 4,38%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.1 pada bulan Februari 2024 adalah 6,08%.

## 3. Komponen

Tahun 2024, D1.1 memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Februari 2024 adalah 4,8%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran D1.1 TA 2024 adalah sebesar Rp18.754.375.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18.754.375.000	162.327.333	0,87%	18.592.047.667
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18.754.375.000</b>	<b>162.327.333</b>	<b>0,87%</b>	<b>18.592.047.667</b>

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.1 di bulan Februari 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran D1.1 (parsial) sebesar Rp162.327.333. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp215.932.006 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp-53.604.673 atau -24,82%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.1 adalah 128,16%. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.

---

#### **D. Rekomendasi**

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
5. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
6. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

## 2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	3 Dokumen	Progres: 5%
		Jumlah pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD Badan Hukum Publik dan Desa	3 Dokumen	Progres: 5%

#### 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	125-Pedoman/Model Dokumen KSO BLUD dan Kerjasama BUMD	2 NSPK	Progres: 8,33%
2.	124-Model Dokumen PBJ Khusus	3 NSPK	Progres: 8,33%
3.	123-Instansi/Proyek yang Mendapat Pendampingan dalam PBJ Khusus	14 Lembaga	Progres: 5%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.2 pada bulan Februari 2024 adalah 7,22%.

#### 3. Komponen

Tahun 2024, D1.2 memiliki 9 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Februari 2024 adalah 8,33%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu D1.2 TA 2024 adalah sebesar Rp2.318.730.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.318.730.000	237.789.560	10.26%	2.080.940.440

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.318.730.000</b>	<b>237.789.560</b>	<b>10.26%</b>	<b>2.080.940.440</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.2 di bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran D1.2 (parsial) sebesar Rp218.989.560. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp114.668.744 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp104.320.816 atau 90,98%
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.2 adalah 100% yang telah ditayangkan.

### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
5. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

## 2.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (D1.3) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	1.1-Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	397 Pelaku Usaha	Progres: 8,00%
2.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rekomendasi kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kerjasama Internasional	4 Dokumen	Progres: 12,00%
		Jumlah rekomendasi kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJP	2 NSPK	Progres: 5,00%

#### 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	132-Pelaku UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	4334 UMKM	220 UMKM
2.	131-Kerjasama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional	3 Kesepakatan	Progres: 15,00%
3.	131-NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5 NSPK	Progres: 5,00%
4.	131-NSPK Pengadaan Barang/Jasa dalam Kerangka Kerjasama Internasional	12 NSPK	Progres: 12,00%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.3 pada bulan Februari 2024 adalah 10,00%.

#### 3. Komponen

Tahun 2024, D1.3 memiliki 11 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Februari 2024 adalah 10,00%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu D1.3 TA 2024 adalah sebesar Rp10.552.028.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	10.552.028.000	392.764.402	3.72%	10.159.263.598
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>10.552.028.000</b>	<b>392.764.402</b>	<b>3.72%</b>	<b>10.159.263.598</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.3 di bulan Februari 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran D1.3 (parsial) sebesar Rp392.764.402. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp540.144.121. sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp147.379.719 atau -27,29%
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.2 adalah 100% yang telah ditayangkan.

### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.

- Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

## 2.7 DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan (D2.1) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah segmen integrasi sistem informasi rencana umum pengadaan dengan sistem informasi lainnya	2 Segmen	Progres: 2 Persen
		Jumlah segmen integrasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pengadaan dengan sistem lainnya	3 Segmen	Progres: 0 Persen
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan	624 K/L/Pemda	Progres: 0 Persen
2.	5.2-Terselenggaranya monitoring dan evaluasi PBJ	Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah	80 Persen	Progres: 0 Persen

#### 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	211-Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 6 Persen
2.	212-Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 4 Persen
3.	211-Roadmap IT LKPP 2025-2029	1 Dokumen	Progres: 5 Persen
4.	211-Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP	2 Laporan	Progres: 5 Persen

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.1 pada bulan Februari 2024 adalah 5%.

### 3. Komponen

Tahun 2024, D2.1 memiliki 11 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Februari 2024 adalah 2%.

#### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran D2.1 TA 2024 adalah sebesar Rp4,831,489,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	4,831,489,000	239.853.669	4.96%	4.591.635.331
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4,831,489,000</b>	<b>239.853.669</b>	<b>4.96%</b>	<b>4.591.635.331</b>

#### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.1 di bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024, realisasi penyerapan anggaran D2.1 (parsial) adalah sebesar Rp194.533.669. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp166.732.246 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp27.801.423 atau 16,67%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.1 yang telah ditayangkan adalah 96,65%, hal tersebut dikarenakan rencana pengadaan yang belum seluruhnya *diinput* pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terdapat 2 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu:
  - a. Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi.
  - b. Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi.

#### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
5. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
6. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
7. Melakukan monitoring berkala terhadap capaian pada indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP.

## 2.8 DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2) memiliki 5 indikator Sasaran Kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 5 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat	450 LPSE	310 LPSE
		Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya	3 Segmen	Progres: 10%
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan non e-purchasing	450 K/L/Pemda	Progres: 0%
2.	5.3-Terwujudnya tata kelola sistem informasi	Jumlah LPSE yang memenuhi maturitas tata kelola LPSE	273 LPSE	2 LPSE

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
	pengadaan digital yang andal	Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem informasi pengadaan digital	100 Persen	Progres: 28%

## 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	231-SPSE Terpusat	450 Layanan	310 Layanan
2.	234-Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Memiliki Maturitas Tata Kelola	273 Unit Kerja	241 Unit Kerja

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.2 pada bulan Februari 2024 adalah 9,44%.

## 3. Komponen

Tahun 2024, D2.2 memiliki 8 Komponen dan rata-rata capaian komponen pada bulan Februari 2024 adalah 11,38%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran D2.2 TA 2024 adalah sebesar Rp14,831,835,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D2.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	14,831,835,000	692.383.394,00	4.67%	14.139.451.606
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14,831,835,000</b>	<b>692.383.394,00</b>	<b>4.67%</b>	<b>14.139.451.606</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.2 di bulan Februari 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran D2.2 (parsial) sebesar Rp692.383.394. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp2.438.703.279 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp1.746.319.885 atau -71,61%
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.2 adalah 100% yang ditayangkan.

3. Pada indikator Sasaran Kegiatan Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat, terdapat beberapa permasalahan:
  - 1) Terdapat beberapa K/L/Pemda yang masih belum menggunakan *service-service* dari SPSE terpusat;
  - 2) Kurangnya komitmen dari beberapa LPSE untuk mengimplementasi aplikasi SPSE Terpusat.
  - 3) Koordinasi dalam menjalin kerja sama dengan *stakeholder* dalam proses integrasi SPSE Terpusat. Beberapa *stakeholder* antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
4. Pada indikator Sasaran Kegiatan "Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya" terdapat kendala koordinasi dalam menjalin kerjasama dengan instansi terkait yang mendukung tercapainya Renstra.
5. Pada indikator Sasaran Kegiatan "Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan non e-purchasing", terdapat kendala yaitu kebergantungan pada kesediaan K/L/Pemda menggunakan sistem informasi pengadaan non e-purchasing dalam PBJP.
6. Pada RO "Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Memiliki Maturitas Tata Kelola", masih terdapat LPSE yang terkendala infrastruktur untuk memenuhi 17 standar.

---

#### **D. Rekomendasi**

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
5. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
6. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya, agar meningkatkan koordinasi yang lebih baik dan melaporkan kepada pimpinan.

7. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan non e-purchasing, agar dilakukan pendekatan yang persuasif terhadap K/L/Pemda yang belum menggunakan sistem informasi pengadaan non e-purchasing dalam PBJP.
8. Terhadap RO-Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Memiliki Maturitas Tata Kelola, agar dapat dilakukan komunikasi yang intensif untuk mengidentifikasi kendala infrastruktur apa saja yang terjadi dan memberikan alternatif solusi pada LPSE tersebut.

## 2.9 DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pasar Digital Pengadaan (D2.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	2.1-Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah	Jumlah PDN yang tayang pada Katalog Elektronik	10.000.000 PDN	5.479.156 PDN
		Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik	4.500.000 Produk UMK-K	5.088.379 Produk UMK-K
2.	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya	1 Segmen	4 Segmen
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing	450 K/L/Pemda	574 K/L/Pemda

#### 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	221-Pedoman Sistem Katalog dan E-Purchasing	2 Pedoman	Progres: 14,57%
2.	221-Produk yang Masuk E-Catalogue	10.000.000 Produk	5.479.156 Produk
3.	221-Sistem E-Purchasing Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 15%
4.	221-Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik	1 Laporan	Progres: 16,70%

Rata-rata progres Rincian Ouput (RO) D2.3 pada bulan Februari 2024 adalah 15,73%.

### 3. Komponen

Tahun 2024 D2.3 memiliki 12 Komponen dan rata-rata capaian komponen pada bulan Februari 2024 adalah 13,38%.

#### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran D2.3 TA 2024 adalah sebesar Rp18,269,975,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18,269,975,000	2.993.700.431	16.39%	15.276.274.569
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18,269,975,000</b>	<b>2.993.700.431</b>	<b>16.39%</b>	<b>15.276.274.569</b>

#### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.3 di bulan Februari 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024 realisasi penyerapan anggaran D2.3 (parsial) adalah sebesar Rp2.255.407.431, realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp644.527.338 sehingga memiliki deviasi sebesar minus Rp1.610.880.093 atau 249,93%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.3 adalah 113,42%. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Pada Sasaran Kegiatan "Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah" terdapat kendala pada proses penarikan data pada Dashboard Monev Katalog yang seringkali terjadi perbedaan data dikarenakan sistem/server yang berat.
4. Terdapat permasalahan pada Sasaran Kegiatan "Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik", antara lain:
  - a. Pada Indikator Sasaran Kegiatan "Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-purchasing dengan sistem lainnya" yang saat ini masih menunggu MoU/PKS dengan kemenESDM terkait integrasi dengan SHE, serta menunggu MoU/PKS dengan Kementerian Agama terkait integrasi data Sertifikat Halal.
  - b. Pada Indikator Sasaran Kegiatan "Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing" belum semua KLPD yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-Purchasing, mengingat masih awal tahun pengadaan 2024.

5. Terdapat kendala pada Komponen "Penelaahan Etalase Produk" yang saat ini Masih menunggu waktu launching *New Platform* Katalog Elektronik.
6. Pada RO "Sistem E-Purchasing Terintegrasi", terdapat kendala bahwa perlu menunggu aturan terbaru terkait mini kompetisi konstruksi dan non konstruksi serta penggunaan *e-purchasing* oleh non K/L/PD (BUMN/BUMD/BLU/BLUD/BUMDes/BUMDesma).
7. Terdapat kinerja yang realisasinya sampai dengan bulan Februari 2024 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, antara lain:
  - a. SK "Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah", indikator Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik yang telah terealisasi 5.088.379 produk UMK-K, dari target sebesar 4.500.000 produk UMK-K,
  - b. SK "Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik" pada indikator sebagai berikut:
    - 1) Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya telah terealisasi sebanyak 4 Segmen, dari target sebanyak 1 Segmen,
    - 2) Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing telah terealisasi sebanyak 574 K/L/Pemda, dari target sebanyak 450 K/L/Pemda
8. Terdapat 2 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu:
  - a. Produk yang Masuk *e-Catalogue*; dan
  - b. Sistem *e-Purchasing* Terintegrasi

---

#### **D. Rekomendasi**

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.

5. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
6. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
7. Terkait dengan Sasaran Kegiatan "Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah" dimana masih terkendala dalam proses *generate*/penarikan data yang realif membutuhkan waktu, diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan tim pengelola aplikasi untuk dapat menindaklanjuti baik dari sisi infrastruktur maupun sistem yang digunakan.
8. Terhadap Indikator Sasaran Kegiatan "Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya", unit organisasi diharapkan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengaselerasi penyelesaian MoU/Perjanjian Kerja Sama
9. Terhadap Rincian Output Sistem e-Purchasing Terintegrasi, agar melakukan akselerasi proses penyusunan peraturan terkait mini kompetisi konstruksi dan non konstruksi serta penggunaan e-purchasing oleh non K/L/PD.
10. Terkait dengan 3 indikator Sasaran Kinerja yang realisasinya telah melebihi target, agar menginformasikan dan berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas target yang telah tercapai di bulan Februari 2024. Mengingat bahwa capaian ini akan menjadi catatan oleh BAPPENAS pada saat rapat monitoring dan evaluasi di tingkat Kementerian/Lembaga.
11. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

## 2.10 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	7.600 Orang	8.418 Orang
		Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK	7.975 Orang	12.622 Orang
2.	6.2-Meningkatnya kapabilitas UKPBJ	Persentase pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ	70 Persen	65.89 Persen

## 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/ Progres
1	311-Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Rekomendasi Kebijakan	Progress: 12.50 Persen
2.	311-SDM JF PPBJ	7.600 Orang	8.418 Orang
3.	311-UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	382 Lembaga	331 Lembaga

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D3.1 pada bulan Februari 2024 adalah 16,5%.

## 3. Komponen

Tahun 2024, D3.1 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output dan rata-rata capaian komponen pada bulan Februari 2024 adalah 12,56%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran D3.1 TA 2024 adalah sebesar Rp3,969,791,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	Rp3,969,791,000	Rp122.744.448	3.09%	Rp3.847.046.552
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Rp3,969,791,000</b>	<b>Rp122.744.448</b>	<b>3.09%</b>	<b>Rp3.847.046.552</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.1 di bulan Februari 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran D3.1 (parsial) sebesar Rp82.085.996. Realisasi ini lebih besar dari RPD sebesar Rp17.319.446 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp64.766.550 atau 373,95%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D3.1 adalah 100% telah ditayangkan.
3. Terdapat beberapa permasalahan pada RO Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - a. Perlu perbaikan terkait Rancangan Keputusan Deputy tentang Pedoman Pemetaan Kompetensi Teknis dalam rangka pengembangan kompetensi kepala UKPBJ.

- b. Perubahan ruang lingkup dan kompetensi PPK dalam rangka penyusunan revisi Perlem 7/2021 karena masih menunggu regulasi perpres PBJP terbaru.
  - c. Proses finalisasi daftar identifikasi masalah regulasi Keputusan Deputy PPSDM terkait Perpindahan JFPPBJ dari Jabatan Lain pada ketentuan Uji kompetensi masih menunggu pembahasan internal unor terkait.
4. Terdapat 2 indikator Sasaran Kinerja yaitu Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda dan Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK serta 1 Rincian Output pada SDM JF PPBJ yang realisasinya telah melebihi target.
  5. Terdapat 1 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3).

---

#### **D. Rekomendasi**

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu;
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
5. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
6. Terkait permasalahan pada RO Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan koordinasi antara Kedeputusan PPSDM, BHOSDM dan Kedeputusan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan (D1).
7. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
8. Terkait dengan 2 indikator Sasaran Kinerja yaitu Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda dan Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK serta 1 Rincian Output pada SDM JF PPBJ yang realisasinya telah melebihi target, agar menginformasikan dan berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas target yang telah tercapai di bulan Februari 2024. Mengingat bahwa capaian

ini akan menjadi catatan oleh BAPPENAS pada saat rapat monitoring dan evaluasi di tingkat Kementerian/Lembaga.

9. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

## 2.11 DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 6 indikator Rincian Output, dan 17 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah SDM PBJ yang mengikuti sertifikasi kompetensi	5.480 Orang	1.487 Orang
		Keterandalan sistem sertifikasi kompetensi	92%	90%

#### 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	331-Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar	34 Lembaga	1 Lembaga
2.	331-Asesor yang Mendapatkan Pembinaan	75 Orang	Progres: 5%
3.	331-Peserta Sertifikasi SDM PBJ	5.480 Orang	1.487 Orang
4.	331-Pedoman Sertifikasi PBJP	1 Pedoman	Progres: 11%
5.	332-Materi Uji Sertifikasi PBJP	20 NSPK	7
6.	331-Sarana Sertifikasi PBJP	196 Unit	32

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D3.3 pada bulan Februari 2024 adalah 18,47%.

#### 3. Komponen

Tahun 2024 D3.3 memiliki 18 Komponen dari 6 Rincian Output dan rata-rata capaian komponen pada bulan Februari 2024 adalah 26,98%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran D3.3 TA 2024 adalah sebesar Rp3.819.469.000  
 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif).  
 Penyerapan per jenis belanja pada D3.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.819.469.000	364.787.156	9.55%	3.454.681.844
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3.819.469.000</b>	<b>364.787.156</b>	<b>9.55%</b>	<b>3.454.681.844</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.3 di bulan Februari 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran D3.3 (parsial) sebesar Rp260.537.156. Realisasi ini lebih besar dari RPD sebesar Rp257.316.997 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp3.220.159 atau 1,25%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D3.3 adalah 100% telah ditayangkan.
3. Terdapat permasalahan pada Rincian Output Sarana Sertifikasi PBJP yaitu:
  - a) Beban pekerjaan yang tinggi
  - b) Kurangnya personil tim yang terlibat
  - c) Koneksi antar server yang kurang stabil
4. Pada Komponen Sosialisasi Pedoman terdapat kendala yang dihadapi mengenai Fitur TUK pada aplikasi PPSDM masih terdapat banyak eror.

### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
4. Pada RO Sarana Sertifikasi PBJP yaitu:
  - a. Melakukan Koordinasi dengan BHOSDM guna mendapatkan solusi terkait beban pekerjaan dan kekurangan personel.
  - b. Mengkoordinasikan dengan pimpinan terkait tugas pokok dan fungsi setiap personil dalam tim.

- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pusdatin sebagai pengelola server PPSDM untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Koneksi antar server yang kurang stabil.
- 5. Pada komponen sosialisasi pedoman yaitu dengan memeriksa kembali update fitur dan menghubungi developer aplikasi pada fitur TUK.

## 2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	3.1- Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	68 K/L	3 K/L
		Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	60 K/L	3 K/L
2.	7.1-Meningkatnya clearing house, konsolidasi, dan probity advice di K/L	Jumlah K/L yang menyelenggarakan clearing house yang efektif	50 K/L	42 K/L
		Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	16 K/L	1 K/L

#### 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	411-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	68 K/L	3 K/L
2.	412-Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House	20 K/L	2 K/L
3.	413-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi	16 K/L	2 K/L

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.1 pada bulan Februari 2024 adalah 8,90%.

#### 3. Komponen

Tahun 2024, D4.1 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 11,33%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran D4.1 TA 2024 adalah sebesar Rp 3.229.245.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.229.245.000	92.128.666.000	2.85%	3.137.166.334
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3.229.245.000</b>	<b>92.128.666.000</b>	<b>2.85%</b>	<b>3.137.166.334</b>

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.1 di bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran D4.1 (parsial) sebesar 79.895.666,-. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp. 38.691.869,- sehingga memiliki deviasi sebesar 41.203.797 atau 106,49%
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D4.1 adalah 65,32% yang ditayangkan. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum seluruhnya diinput pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan.

## D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

4. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
5. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
6. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

## 2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	3.2-Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	530 Pemda	450 Pemda
		Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	538 Pemda	400 Pemda
2.	7.2-Meningkatnya clearing house, konsolidasi, dan probity advice di Pemda	Jumlah Pemda yang menyelenggarakan clearing house yang efektif	100 Pemda	84 Pemda
		Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau <i>probity advice</i>	50 Pemda	8 Pemda

#### 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	421-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	538 Pemda	71 Pemda
2.	422- Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan <i>Clearing House</i>	100 Pemda	84 Pemda
3.	423-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan <i>Probity Advice</i> , Konsolidasi dan/atau Advokasi	50 Pemda	8 Pemda

Rata-rata progres Rincian Ouput (RO) D4.2 pada bulan Februari 2024 adalah 16,4%.

### 3. Komponen

Tahun 2024, D4.2 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 13,06%.

#### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran D4.2 TA 2024 adalah sebesar Rp 18.663.984.000,.  
Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif).  
Penyerapan per jenis belanja pada D4.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18.663.984.000	77.841.875	0.42 %	18.586.142.125
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18.663.984.000</b>	<b>77.841.875</b>	<b>0.42 %</b>	<b>18.586.142.125</b>

#### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.2 di bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran D4.2 (parsial) sebesar Rp 71.819.875,-. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 175.904.859,- sehingga memiliki deviasi sebesar -104.084.984 atau -59,17%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D4.2 adalah 100% yang telah ditayangkan.
3. Terdapat permasalahan yang sama pada indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN, indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K, dan Rincian Output Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ adalah bahwa pada awal tahun, belanja pengadaan masih tergolong sedikit dan belum semua tercatat dalam sistem sehingga data belanja UMK belum mencapai puncaknya.
4. Terdapat Permasalahan pada indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemda yang menyelenggarakan *Clearing House* yang efektif dan Rincian Output Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan *Clearing House*, antara lain adalah:
  - a. Belum semua Pemda terinformasikan terkait dengan adanya forum *Clearing House*, baik tata cara pembentukan, anggota yang terlibat, serta honorarium yang didapat.
  - b. Pemda masih belum terdorong untuk membentuk *Clearing House* karena beberapa faktor, seperti anggaran, manfaat bagi personil, dan merasa bahwa penyelesaian permasalahan pengadaan harus melalui LKPP.

5. Terdapat permasalahan pada indikator Sasaran Kegiatan Pemerintah Daerah yang Mendapatkan *Probitly Advice*, Konsolidasi dan/atau Advokasi yaitu:
  - a. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan, masih ada Pemda yang belum mempertimbangkan melakukan konsolidasi pengadaan.
  - b. Belum ada pemetaan mendalam terhadap komoditas potensial antar OPD yang dapat dikonsolidasikan.
  - c. Adanya kendala intervensi non-teknis dalam pelaksanaan konsolidasi Pemda, terutama jika melihat potensi lingkup konsolidasi yang luas (tingkat kota/kabupaten atau provinsi).
  - d. Terdapat Pemda yang belum mengetahui adanya layanan *probitly advice*, atau mengetahui syarat-syarat sebuah paket diberikan *probitly advice* oleh LKPP.

---

#### D. Rekomendasi

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
5. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN, Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K, dan Rincian Output Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ dapat dilakukan antara lain:
  - a. Melakukan pemetaan serta monitoring secara berkala kepada Pemerintah Daerah yang belum menerapkan belanja PDN dan UMK sesuai dengan kriteria minimalnya.
  - b. Mendorong pencatatan belanja pengadaan secara berkala kepada Pemerintah Daerah terutama untuk belanja pengadaan PDN dan UMK melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/kegiatan sejenis lainnya.

- c. Mendorong peningkatan jumlah dan kualitas produk PDN dan UMK kepada pemangku kepentingan seperti Kemenperin, Kemendag, Kemenkop UKM, dan berkoordinasi dengan direktorat terkait di LKPP.
- 6. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemda yang menyelenggarakan *Clearing House* yang efektif dan Rincian Output Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan *Clearing House*, dapat dilakukan antara lain:
  - a. Sosialisasi/bimbingan teknis, baik melalui tatap muka maupun melalui daring atau media sosial, yang menjelaskan terkait urgensi pelaksanaan *Clearing House* bagi masing-masing daerah.
  - b. Melibatkan Pemda yang telah berhasil dalam melaksanakan *Clearing House* sebagai *success story* agar menarik minat Pemda lainnya dalam turut serta melaksanakan *Clearing House*;
- 7. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemerintah Daerah yang Mendapatkan *Probity Advice*, Konsolidasi dan/atau Advokasi dapat dilakukan:
  - a. Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan *awareness* kepada Pemerintah Daerah terkait konsolidasi pengadaan melalui sosialisasi/bimbingan teknis/kegiatan sejenis lainnya. Dalam kegiatan tersebut dapat melibatkan Pemerintah Daerah yang telah berhasil dalam melaksanakan konsolidasi sebagai *success story* agar menarik minat Pemda lainnya yang berpotensi untuk melaksanakan konsolidasi.
  - b. Melakukan *probity advice* terhadap Pemerintah Daerah yang akan melakukan konsolidasi pengadaan.
  - c. Sosialisasi terkait layanan *probity advice* oleh LKPP beserta persyaratan yang harus dipenuhi.

## 2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 14 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	7.3-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	Persentase perkara/permasalahan PBJP yang terlayani	100 Persen	100 Persen (Progress 26%)
		Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS	50 /K/L/Pemda	45 K/L/Pemda
		Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki Sistem Pengaduan dan ditingkatkan kapasitasnya	65 APIP K/L/Pemda	40 APIP K/L/Pemda

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
		Jumlah Provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli yang optimal	15 Provinsi	10 Provinsi

## 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	431-Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk	2 Orang	Progres: 40%
2.	432-Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk	50 Orang	Progres: 20%
3.	431-Perkara Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani	360 Perkara	67 Perkara
4.	432-Perkara Permasalahan Kontrak PBJP yang Terlayani LPS	25 Perkara	2 Perkara
5.	431-Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	9 Lembaga	Progres: 20%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.3 pada bulan Februari 2024 adalah 25%.

## 3. Komponen

Tahun 2024, D4.3 memiliki 14 Komponen dari 5 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 42,14%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran D4.3 TA 2024 adalah sebesar Rp 2.101.112.000,-. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	2.101.112.000	92.748.818	4.41%	2.008.363.182
53 Belanja Modal			0%	
<b>Total</b>	<b>2.101.112.000</b>	<b>92.748.818</b>	<b>4.41%</b>	<b>2.008.363.182</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.3 di bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran D4.3 (parsial) sebesar Rp 72.345.818,-. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 96.955.355,- sehingga memiliki deviasi sebesar Rp 24.609.537,- atau -25,38%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D4.3 adalah 100% yang telah ditayangkan.

## D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.

## 2.15 INSPEKTORAT

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024 Inspektorat memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 1 indikator Rincian Output, dan 4 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	8.8-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi	Level kapabilitas Inspektorat LKPP	Level 3	Progres: 16.67%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP	85 Persen	Progres: 16.67%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
		Survei persepsi kepuasan Unit Organisasi terhadap pengawasan internal	Predikat: Sangat Memuaskan	Progres: 16.67%
		Nilai kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Predikat: Sangat Baik	Progres: 16.67%

## 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	965-Layanan Audit Internal	12 Dokumen	Progres: 16.67%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Inspektorat pada bulan Februari 2024 adalah 16,67%.

## 3. Komponen

Tahun 2024. Inspektorat memiliki 4 Komponen dari 1 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 16,67%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran Inspektorat TA 2024 adalah sebesar Rp1.000.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Inspektorat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	1.000.000.000	37.801.046	3.78%	962.198.954
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
<b>Total</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>37.801.046</b>	<b>3.78%</b>	<b>962.198.954</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Terdapat beberapa catatan pada Inspektorat di bulan Februari 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran Inspektorat (parsial) sebesar Rp16.461.046. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp172.412.496. sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp155.951.450 atau -90,45%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Inspektorat adalah 100% telah ditayangkan.

### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
4. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

## 2.16 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 7 indikator Rincian Output, dan 19 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah peserta pelatihan fungsional pengelola PBJ dan peserta pelatihan teknis kompetensi PBJ yang terlatih	19.600 Orang	3.334 Orang
		Jumlah peserta pelatihan teknis tematik PBJ yang terlatih	4.250 Orang	Progres: 15%
		Jumlah sumber daya pengelola fungsi PBJ yang lulus sertifikasi kompetensi	12.000 Orang	Progres: 15%
		Persentase peningkatan kualitas pelatihan	85 Persen	68,12 Persen

## 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	511-LPPBJ yang Terakreditasi	80 Lembaga	19 Lembaga
2.	511-Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ	7 NSPK	Progres: 10%
3.	512-Pedoman Pelatihan PBJ	3 Pedoman	Progres: 15%
4.	511-Media Pembelajaran Berbasis TIK	5 Paket	Progres: 15%
5.	511-Peserta Pelatihan PBJ Teknis	22.950 Orang	1.896 Orang
6.	512-Peserta Pelatihan PBJ Fungsional	1.400 Orang	196 Orang
7.	512-Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan PBJP	2 Laporan	Progres: 20%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Puslat SDM PBJ pada bulan Februari 2024 adalah 14,52%.

## 3. Komponen

Tahun 2024, Puslat SDM PBJ memiliki 19 Komponen dari 7 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 13,99%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran Puslat SDM PBJ TA 2024 adalah sebesar Rp3.911.894.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada Puslat PBJ sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	3.444.686.000	269.450.000	7.82%	3.175.236.000
53 Belanja Modal	467.208.000	-	0%	467.208.000
<b>Total</b>	<b>3.911.894.000</b>	<b>269.450.000</b>	<b>6.89%</b>	<b>3.642.444.000</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdiklat di bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024 realisasi penyerapan anggaran Puslat SDM PBJ (parsial) adalah sebesar Rp176.670.000 realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih besar dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp221.552.766 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp44.882.766 atau -20,26%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Puslat SDM PBJ telah 100,00% ditayangkan.
3. Pada indikator Sasaran Kegiatan Jumlah peserta pelatihan teknis tematik PBJ yang terlatih, realisasi masih nol karena pada Bulan Februari baru dilaksanakan seluruh Pelatihan Teknis Tematik batch 1 yang akan selesai dilaksanakan pada bulan April 2024.
4. Pada indikator Sasaran Kegiatan Jumlah sumber daya pengelola fungsi PBJ yang lulus sertifikasi kompetensi masih realisasi 0 karena Baru dibukanya pelaksanaan pelatihan PPK

Tipe C Batch 1 yang akan selesai dilaksanakan pada bulan Maret 2024 dan Belum ada peserta lulus pelatihan yang mengikuti uji kompetensi.

## D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
4. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

## 3.17 PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 8 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	8.7-Terwujudnya layanan data dan sistem informasi yang andal dan responsif	Predikat SPBE	Predikat: Baik	Progres: 17%

## 2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Progres: 17%
2.	963-Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	1 Layanan	Progres: 17%
3.	963-Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	16 Unit	Progres: 17%
4.	963-Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9 Sistem Informasi	Progres: 17%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Pusdatin pada bulan Februari 2024 adalah 17%.

## 3. Komponen

Tahun 2024, Pusdatin memiliki 9 Komponen dari 4 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 17%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, pagu anggaran Pusdatin TA 2024 adalah sebesar Rp9.806.987.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Pusdatin sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	8.422.043.000	133.211.150	1.58%	8.288.831.850
53 Belanja Modal	1.384.944.000	-	-	1.384.944.000
<b>Total</b>	<b>9.806.987.000</b>	<b>133.211.150</b>	<b>1.36%</b>	<b>9.673.775.850</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdatin di bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024 realisasi penyerapan anggaran Pusdatin (parsial) adalah sebesar Rp115.643.150 realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp142.281.227 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp-26.638.077 atau -18,72%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pusdatin adalah 88,54% yang ditayangkan, hal ini karena rencana pengadaan belum seluruhnya diinput pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.

### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$  dapat tercapai.
4. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
5. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

## BAB III KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Februari 2024, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada tahun 2024, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp244.786.416.000 dan sampai dengan bulan february 2024 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp15.932.975.679 (6,51%) yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	5.516.018.693	10,25%	48.282.560.307
52 Belanja Barang	169.724.173.000	10.053.844.486	5,92%	159.670.328.514
53 Belanja Modal	21.263.664.000	363.112.500	1,71%	20.900.551.500
<b>TOTAL</b>	<b>244.786.416.000</b>	<b>15.932.975.679</b>	<b>6,51%</b>	<b>228.853.440.321</b>

2. Pada bulan Februari 2024 realisasi anggaran LKPP (parsial) sebesar Rp12.594.369.781. Realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) LKPP pada bulan Februari 2024 sebesar 12.014.090.590, sehingga memiliki deviasi sebesar 580.279.191 atau 4,83%.
3. Unit organisasi yang memiliki deviasi RPD masih dalam ambang batas ( $\pm 5\%$ ) adalah Biro Hukum Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan dan Keuangan (Belanja Pegawai) dan Direktorat Sertifikasi Profesi, sedangkan unit organisasi lainnya memiliki deviasi RPD di luar ambang batas ( $\pm 5\%$ ).
4. Pada tahun 2024 pagu pengadaan LKPP sebesar Rp190.987.837.000 (78,02%). Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 13 Maret 2024, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp196.613.760.000 atau sebesar 102,95%. Terdapat Selisih pagu pengadaan dengan penayangan pada aplikasi SiRUP adalah sebesar -Rp5.625.923.000.
5. Nilai IKPA LKPP bulan Februari 2024 berdasarkan Aplikasi OMSPAN ([spanint.kemenkeu.go.id](http://spanint.kemenkeu.go.id)) adalah sebesar 64,43.
6. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LKPP pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan sampai dengan saat ini belum dapat diinformasikan, dikarenakan aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2024.
7. Terdapat indikator yang realisasinya telah melebihi target, yaitu:
  - a. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik
  - b. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya

- c. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing
  - d. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda
  - e. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK
  - f. Indikator Rincian Output - SDM JF PPBJ
8. Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja LKPP, setiap pimpinan unit organisasi agar:
- a. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan memperhatikan target penyerapan triwulanan sesuai dengan Nota Dinas Plt. Sekretaris Utama Nomor 2723/SES/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan menyampaikan RPD tersebut kepada Biro Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
  - c. Mempercepat kegiatan dan proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran triwulan I sebesar  $\geq 15,7\%$
  - d. Mencermati dan segera meng-*update* pengumuman RUP di SiRUP bagi unit organisasi yang penayangan RUP pada aplikasi SiRUP belum sesuai dengan anggaran belanja pengadaannya;
  - e. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan paket pengadaan barang/jasa yang sudah diumumkan dapat segera diproses dalam triwulan I;
  - f. Memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing (Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Rincian Output dan komponen);
  - g. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing;
  - h. Menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Februari 2024 dan melaporkan progres tindaklanjut melalui Aplikasi SiREMON.

